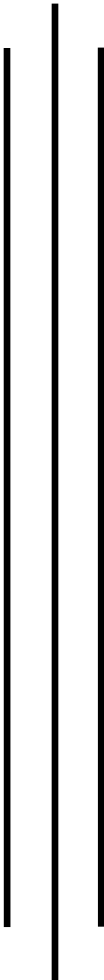


LAMPIRAN XXVI : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2027





DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA BATAM

RENJA

TAHUN 2027



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukkseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, 22 Juli 2026
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Batam



Salim, S.Sos., M.Si
NIP. 196810211990101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	I-1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	I-1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-2
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	I-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-21
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	II-21
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	II-21
2.3.3 Peluang dan Tantangan	II-24
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	II-25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-43
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-3
3.3 Program dan Kegiatan	III-4
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	 IV-1
 BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 V-1
 BAB VI PENUTUP	 VI-1
5.1 Catatan Penting	VI-1
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	VI-2
5.3 Rencana Tindak Lanjut	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Batam	II-4
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	II-19
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kota Batam	II-26
Tabel 2.4	rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah	II-43
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kota Batam	II-40
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Program Prioritas	III-2
Tabel 3.2	Target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2027.....	III-3
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028.....	III-5
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027	IV-2
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2027 dan Target Akhir Tahun 2030	V-1
Tabel 5.2	Indikator Indikator Kinerja Kunci	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja.....	I-2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029. Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan perencanaan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan

kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja

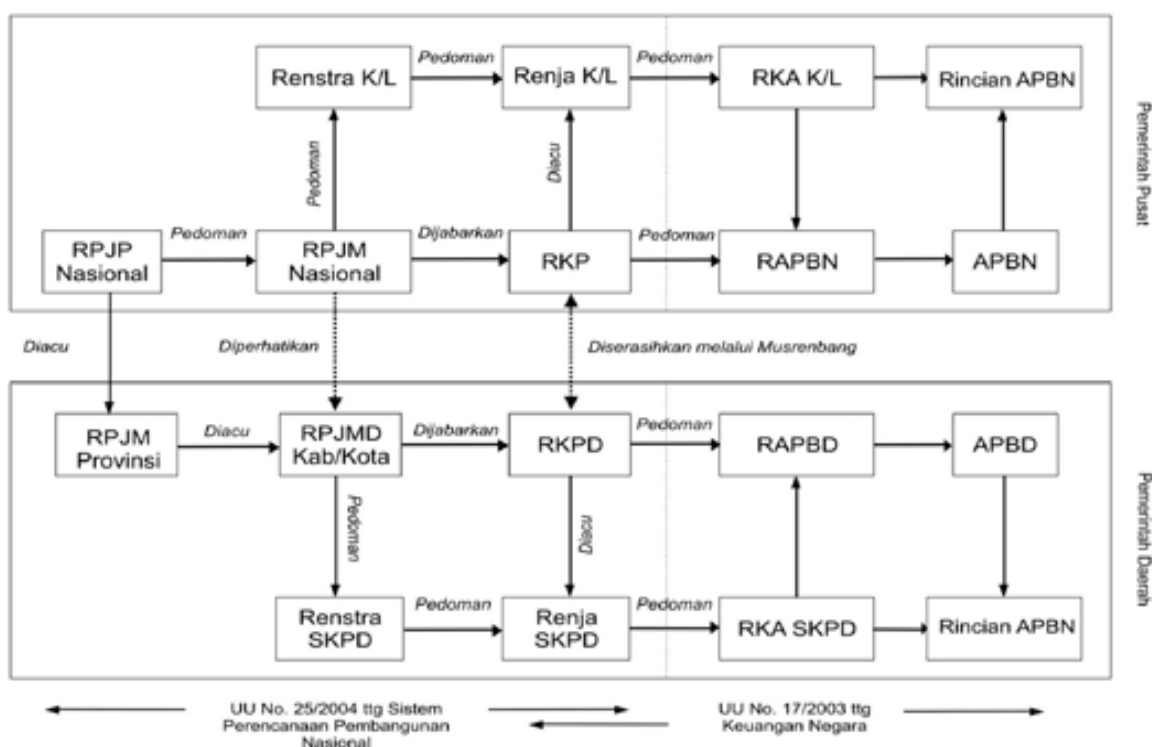


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1363);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 72 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027 dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat

- Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecildengan indikator Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha sesuai rencana kebutuhan dari target 30,30% realisasi 24,89%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: indikator: Nilai SAKIP OPD target 72,49 realisasi 72,49
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - f. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 100% realisasi 100%
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - h. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Daerah target 1 Unit Kerja realisasi 1 Unit Kerja
 - i. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi indikator Jumlah

SDM (pengurus) yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian target 49,19%, realisasi 49,19%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target kinerja yaitu indikator indeks Pelayanan Kesekretariatan PD target 84,8%, realisasi 98,81%
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yaitu indikator indeks Pelayanan Kesekretariatan PD target 70,65%, realisasi 116,19%
 - c. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota indikator Persentase koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya target 17,13%, realisasi 21,13%
 - d. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota target 55,56%, realisasi 76,19%
 - e. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota target 33,95%, realisasi 40,29%
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya beberapa target indikator kinerja adalah:
 - a. Penyebab tidak tercapainya Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha adalah sosialisasi terhadap subsidi margin belum optimal, adanya sliK OJK, Usaha belum memiliki ijin serta adanya persyaratan Radius 10 KM dari tempau usaha ke Bank Penyalur;

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya beberapa target indikator kinerja adalah:

- a. Perencanaan yang matang dan realistis
- b. Komitmen dan dukungn pimpinan
- c. SDM yang cukup secara jumlah dan memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawab
- d. Alokasi anggaran yang memadai dan tepat waktu
- e. Koordinasi dan kerja sama yang efektif
- f. Lingkungan kerja yang kondusif

Faktor-faktor penyebab realisasi melebihi target pada indikator kinerja adalah meningkatnya efektivitas layanan administrasi dan dukungan manajemen, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses

kesekretariatan, peningkatan kompetensi dan komitmen SDM, serta koordinasi internal dan monitoring pelayanan yang semakin optimal.

5. Implikasi yang timbul dari capaian program Renstra Dinas KUM terhadap capaian sasaran Dinas KUM adalah menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah telah berada pada jalur yang tepat, sehingga berimplikasi langsung pada peningkatan capaian sasaran Dinas KUM, penguatan peran Dinas KUM sebagai motor pengendali dalam perencanaan bidang Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, serta terjaganya konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan Kota Batam dengan dokumen perencanaan perangkat daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
 - a. Terhadap indikator yang telah tercapai sesuai target:

dilakukan penguatan konsistensi perencanaan dan penganggaran melalui pemeliharaan kualitas perencanaan, penajaman indikator kinerja, serta pengalokasian anggaran yang proporsional guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan mencegah penurunan kinerja pada periode berikutnya.
 - b. Terhadap indikator yang belum tercapai target:

dilakukan penyesuaian strategi perencanaan dan penganggaran melalui reviu target dan indikator kinerja, penguatan intervensi program/kegiatan yang berdampak langsung pada sasaran, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengalokasian anggaran yang lebih fokus dan berbasis prioritas.
 - c. Terhadap indikator yang melebihi target:

dilakukan evaluasi atas penetapan target dan asumsi perencanaan, penajaman target kinerja pada periode berikutnya, serta replikasi praktik baik (*best practice*) dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar capaian kinerja tetap efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:Tabel 2.1

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	84,8%	100%	100%	100%	100 %	72,49%	72,49%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 ASN	48 ASN	45 ASN	48 ASN	100 %	57 ASN	57	100%

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	-	-	-		5 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	93,75%%	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	100	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
		Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan daerah (Dengan Satuan: Persentase)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	100	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	100	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	75	75%

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	50	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100 %-	10 Unit	10	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	67	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapora n	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	9	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lapora n	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	9	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	67,92	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	11 Unit	3	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	100 %	56 Unit	40	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	1	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Unit Kerja yang terlaksana	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 %	1 Unit Kerja	1	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 %	1 Unit Kerja	1	100,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	27,34%	29,08 %	28,81%	30,20%	1,04%	27,34%	0	100,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	33,95%	19,48 %	6,74%	7,60%	1,12%	33,95%	0	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	70 Unit Usahai	60 Unit Usaha	65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	100 %	257 Unit Usaha	0	100,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88,89%	80%	83,33%	84,38%	1,012 %	88,89%	0	100,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	55,56%	45,80 %	43,48	43,54%	100%	55,56%	0	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	45 Unit Usaha	25 Unit Usaha	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	100 %	45 Unit Usaha	0	100,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,39%	19,72%	25,36%	25,49%	100 %	35,39%	0	100,00
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	49,12%	54,55%	59,35%	25,49%	0,42%	49,12%	0	100,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	400 Orang	160 Unit Usaha	180 Unit Usaha	65 Unit Usaha	0,36 %	724 Orang	0	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
		(RPJPD/RPJMD/RKPD)								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	30,5%	-	-	-	-	17,77%	43,71	100,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	17,13%	-	-	-	-	17,13%	43,71	100,00
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	64 Unit Usaha	-	-	-	-	67 Kelompok Masyarakat	146	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Ekonomi Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi									100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro informal dan formal yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	70,95%	35,91 %	35,34%	125,63%	3,55 %	70,95%	60,75	100,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	53,08%	400 Unit Usaha	482 Unit Usaha	2000	4,14 %	50,67%	86,98	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		100 Unit Usaha	200 Unit Usaha	1700 Unit Usaha	8,5 %	200 Unit Usaha		100,00
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 %	150 Unit Usaha	24	100,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1463 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 %	1243 Unit Usaha	1612	100,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro (PLUT)	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	350 Unit Usaha	100 Unit Usaha	-	-	-	420 Unit Usaha	420	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	88 Unit Usaha	-	-	-	-	88 Unit Usaha	88	100,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	240 Unit	50 Unit Usaha	82 Unit Usaha	100 Unit Usaha	1,21 %	490 Unit Usaha	380	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	57,19%	44,88 %	45,45	45,48%	100 %	57,19%	37,20	60,87%

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	38,30%	500 Unit Usaha	620 Unit Usaha	723 Unit Usaha	1,16 %	38,30%	41,36	24,89%
	Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	1,500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	620 Unit Usaha	723 Unit Usaha	1,16 %	1848 Unit Usaha	445	65%
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	-	-	-	-	30Unit Usaha	30	100,00

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	-	372 Unit usaha	0	

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kota Batam

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2027 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Kota Batam

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
1.	Persentase usaha mikro naik kelas dan koperasi sehat	x	IKU	48,6 %	51,7 6%	59,2 5 %	65,1 8 %	48,6 %	NA	51,7 6%	92,5 0%	
2.	Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam (%)	x	IKU	57,1 9%	58,0 7%	68,9 1%	77,7 5%	57,1 9%	NA	68,9 1%	77,7 5%	
3.	Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam (%)	x	IKU	40 %	45,4 5%	49,5 9 %	52,6 3%	40 %	NA	45,4 5%	49,5 9 %	
4.	Indeks Kepuasan asyarakat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (%)	x	IKU	90,8 1%	91,0 1%	91,2 1%	91,4 1 %	90,8 1%	NA	91,2 1%	91,2 1 %	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K / IK U	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
5.	Penumbuhan Volume Usaha Koperasi	x	IK K	30 %	32,31 %	33,72 %	34,78 %	30 %	NA	NA	NA	
6.	Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	x	IK K	60 %	60,61 %	60,19 %	61,48 %	60 %	NA	NA	NA	
7.	Pertumbuhan Wirausaha	x	IK K	31.41%	32,50 %	32,54 %	32,66 %	31.41%	NA	NA	NA	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, meliputi pemberdayaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan koperasi serta usaha mikro;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan, usaha, sumber daya manusia, akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan daya saing koperasi serta usaha mikro;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan di bidang koperasi dan usaha mikro sesuai kewenangan pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan publik di bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Kompetensi aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, sementara jumlah SDM pada beberapa bidang masih terbatas dibandingkan dengan beban kerja yang terus meningkat;

2. Kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi. Koordinasi antarbidang, penyederhanaan proses bisnis, dan penguatan sistem kerja masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien;
3. Keterbatasan anggaran. Ketersediaan anggaran belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembinaan, pemberdayaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi serta usaha mikro;
4. Sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan fasilitas kerja, peralatan, dan infrastruktur pendukung pelayanan masih perlu ditingkatkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas;
5. Pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi layanan dan pengelolaan data koperasi serta usaha mikro belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mempengaruhi kecepatan, akurasi, dan kualitas pelayanan;
6. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir. Basis data koperasi dan usaha mikro masih memerlukan pembaruan secara berkala agar dapat menjadi dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi program yang tepat sasaran;
7. Efektivitas pembinaan dan pengawasan. Luasnya cakupan wilayah dan banyaknya koperasi serta pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran pembinaan menyebabkan intensitas pendampingan dan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap hasil program dan kegiatan masih perlu diperkuat agar dapat mengukur efektivitas intervensi pemerintah secara lebih komprehensif;
9. Koordinasi internal dan kolaborasi lintas bidang. Sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program masih perlu terus ditingkatkan untuk menghasilkan pelayanan yang terpadu dan berorientasi pada hasil;

B. Permasalahan Eksternal

1. Perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan regulasi dan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, investasi, dan perdagangan menuntut penyesuaian program, kegiatan, serta mekanisme pelayanan secara berkelanjutan;
2. Kondisi perekonomian regional dan nasional. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, dan stabilitas pasar berpengaruh terhadap perkembangan koperasi dan usaha mikro;
3. Perkembangan teknologi digital. Transformasi digital membuka peluang peningkatan daya saing melalui digitalisasi usaha dan pemasaran, namun juga menuntut peningkatan kapasitas pelaku koperasi dan usaha mikro dalam pemanfaatan teknologi;
4. Akses terhadap pembiayaan. Keterbatasan akses pelaku usaha mikro terhadap lembaga keuangan, permodalan, dan investasi masih menjadi tantangan dalam pengembangan usaha;
5. Persaingan usaha yang semakin ketat. Meningkatnya persaingan, baik dengan pelaku usaha skala besar maupun melalui perdagangan

digital, menuntut koperasi dan usaha mikro untuk meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan efisiensi usaha;

6. Kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pendukung. Keberhasilan pengembangan koperasi dan usaha mikro dipengaruhi oleh sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta komunitas bisnis;
7. Perubahan preferensi dan perilaku konsumen. Perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap produk yang berkualitas, aman, ramah lingkungan, dan mudah diakses melalui platform digital mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi;
8. Kondisi sosial dan demografi masyarakat. Pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan perkembangan kewirausahaan mempengaruhi jumlah serta kapasitas pelaku usaha mikro dan koperasi;
9. Risiko bencana dan kondisi kedaruratan. Bencana alam, wabah penyakit, maupun kondisi darurat lainnya dapat mengganggu aktivitas usaha, rantai pasok, distribusi, serta keberlangsungan koperasi dan usaha mikro;
10. Dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarperangkat daerah, dukungan pemerintah pusat, serta partisipasi aktif pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Eksistensi Dinas KUM sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu: (a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah; (c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (d) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
2. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan pelayanan Bappeda

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran pada tingkat operasional;

2. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan subkegiatan pembangunan secara berkala di tingkat perangkat daerah untuk mengarahkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dan subkegiatan maupun sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
4. Manajemen SDM (termasuk kompetensi dan koordinasi) masih perlu ditingkatkan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terdapat beberapa **tantangan** yang harus dihadapi yaitu:

1. Faktor proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
2. Perubahan kebijakan nasional dalam rentang waktu yang berdekatan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah;
3. Terdapatnya pertentangan atau ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, sehingga berdampak terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa **peluang** yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yaitu:

1. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang mengharuskan semuanya untuk ditampung dan diperhatikan;
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi;
4. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.
5. Adanya fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan yang akuntabel dan efektif;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
3. Penguatan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah;
4. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2027
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	12.108.207.681	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Nilai SAKIP PD	76,55 Nilai	14.022.353.198	
								Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	85,8 %		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	85,8%	20.889.483.558	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	11.480.569.251	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	17.330.706.863	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 ASN	11.438.439.251	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 BA	59.096.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	42.130.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	70.373.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian	100%	83.027.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
								aia n Perangka t Daerah yang terlaksana na			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	70.373.600	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	83.027.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	341.438.449	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	294.253.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 Paket	5.412.440	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	10.499.000	

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Kantor yang Disediakan					Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	70.056.470	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	107.576.100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	86.757.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	18.920.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	257.293.839	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	157.258.000	

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	631.424.640	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	654.015.632	
						Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	355.736.232	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	143.269.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25 Unit	298.279.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	292.322.564	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	139.656.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	217.407.453	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	229.148.198	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Paket	75.406.622	

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	1.017.017.442	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	509.310.580	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 Paket	121.169.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 Unit	40.380.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	4 Paket	386.825.234	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan	13 Unit	425.507.757	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
								aan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 Paket	275.971.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 Unit	303.568.100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Paket	233.051.808	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	256.356.988	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Unit Kerja yang terlaksana	1 Paket	117.370.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Unit Kerja yang terlaksana	1	700.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Paket	117.370.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit	700.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
								Pelayanan			
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Batam	Persentase Koperasi aktif	41,11%	391.900.461	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Batam	Persentase Koperasi aktif	41.87%	52.493.300	
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Kota Batam	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	53,76%	391.900.461	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Kota Batam	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	66,97%	52.493.300	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Batam	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50 Unit	260.536.111	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Batam	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan	100	22.750.800	

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
								Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	357 Unit	131.364.350	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	407 Unit Usaha	29.742.500	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Batam	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Batam	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	44,27%	18.979.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	79,65%	18.979.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Batam	Jumlah SDM (pengurus) yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1024	172.538.665	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Batam	Jumlah SDM (pengurus) yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	850 Unit Usaha	18.979.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	Kota Batam	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	59,09%	733.372.696	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	Kota Batam	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	70,44%	215.691.200	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60,00%	733.372.696	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	73,33%	215.691.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
								Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya lainnya termasuk Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	150 Unit	187.148.995	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya lainnya termasuk Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	200 Kelompok Masyarakat	33.187.000	
	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	208 Unit	181.100.121	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya	Kota Batam	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	258 Unit Usaha	13.075.200	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	64 Unit	169.429.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	64 Unit	169.429.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Batam	Persentase pertumbuhan usaha mikro informal dan formal yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usah	76,35%	3.653.746.902	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Batam	Persentase pertumbuhan usaha mikro informal dan formal yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	79,46%	4.910.697.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Batam	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	71,64%	3.653.746.902	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Batam	Persentase Usaha Mikro yang	78,40%	4.910.697.400	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	250 Unit	538.305.405	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Kota Batam	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	300	598.016.942	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 Unit	431.098.712	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Kota Batam	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	2363	357.440.525	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit	381.789.140	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Kota Batam	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha	500	459.968.054	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
								Mikro dan Kecil (UMK)			
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan	50 Unit	431.098.712	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan	350 Unit	474.208.583	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada	Kota Batam	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada	2 unit	975.212.000	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada	Kota Batam	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada	5 unit	672.733.200	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	600 Unit Usaha	1.084.213.895	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	800 Unit Usaha	1.092.635.284	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Batam	Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	68,91%	5.694.736.188	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Batam	Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	77,75%	5.128.651.700	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Batam	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	57,87%	5.694.736.188	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Batam	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	71,91%	5.128.651.700	
	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	648 Unit	1.386.094.545	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Riset dan Inovasi Produk	Kota Batam	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	798	1.744.703.999	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kota Batam	Jumlah yang Difasilitasi	2000 Unit	4.000.000.000	Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Kota Batam	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	2500	4.000.000.000	
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	80 Unit	127.107.211	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Kota Batam	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	105 Unit Usaha	139.817.932	
						Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Batam	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	822	199.687.875	

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutu han Dana	Catatan Penting
								Sumber Daya Manusia, serta desain dan teknologi			
	JUMLAH				24.348.86 5.798,00					24.348. 865.79 8,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi.

Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	100 orang x 7 paket	
2	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	50 orang	
3	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang x 4 paket	
4	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
5	Pelatihan Manajemen dan Keuangan Usaha dan Pembukua	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	
6	Pelatihan Lanjutan Manajemen dan Keuangan Usah	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	
7	Pelatihan Inovasi dan Pengembangan Produk	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	
8	Pelatihan Pemasaran Digital	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	
9	Pelatihan Pemasaran Digital	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	
10	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang x 2 paket	
11	Pelatihan Ekspor dan Akses Pasar Internasional	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	50 orang	
12	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	100 orang	
13	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	200 orang	
14	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	200 orang	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
15	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	100 orang	
16	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	50 orang	
17	Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP)	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	
18	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	200 orang	
19	Pelatihan Pemasaran Digital	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	
20	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	
21	Pelatihan Inovasi dan Pengembangan Produk	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	50 orang	
22	Pelatihan Ekspor dan Akses Pasar Internasional	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	50 orang	
23	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	100 orang	
24	Pelatihan Manajemen dan Keuangan Usaha dan Pembukuan	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
25	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	100 orang	
26	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	
27	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	200 orang	
27	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	200 orang	
28	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	100 orang	
29	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	300 orang	
30	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	100 orang	
31	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	100 orang	
32	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	100 orang	
33	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
34	Pelatihan UMKM	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang x 7 paket	
35	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Izin	50 orang	
36	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 orang x 4 paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2027 berada pada tahap jangka menengah yang ke-3 yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi Tahun 2027, Renja Bappeda Kota Batam Tahun 2027 tidak mendukung secara langsung prioritas-prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. Namun, sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka dukungan Bappeda dalam pencapaian arah kebijakan nasional dan provinsi Tahun 2027 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tabel. 3.1 Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas:

No	RENJA	RKPD	NASIONAL	PAGU (Rp)
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	• Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. • Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/KelurahanMerah Putih	52.439.300,00
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	• Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. • Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/KelurahanMerah Putih	18.979.000,00
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	• Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. • Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/KelurahanMerah Putih	215.691.200,00
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	• Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. • Dukungan Program RKPD Tahun 2027 terhadap Aspek Tematik, Holistik, Integratif	4.910.697.400,00

No	RENJA	RKPD	NASIONAL	PAGU (Rp)
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	• Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. • Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/KelurahanMerah Putih	52.439.300,00
			dan Spasial (THIS) dalam Penanggulangan Kemiskinan (Meningkatkan Pendapatan)	
5.	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM1	• Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.	5.128.651.700,00

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah *“Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam”*.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2027 mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2027

No.	Tujuan/SasaranPD	Indikator Tujuan/Sasaran PD		Target Tahun 2027
1.	Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro	1	Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	68,91%
		2	Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam	49,59%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	91,21%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2027 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2027 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengusulkan 6 (tujuh) program, 14 (empat belas) kegiatan, 36 (tiga puluh enam) subkegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 22.540.585.198,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Adapun program dan kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiran Maju Tahun 2028
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Dan Usaha Mikro

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				24.348.865.798,00				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.348.865.798,00				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				24.348.865.798,00				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.022.353.198			-	21.835.162.641
[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan]	Nilai SAKIP PD Indeks pelayanan kesekretariatan PD		74,55 nilai 85,8 %	14.022.353.198				21.835.162.641
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.								

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	94.407.090	PAD			37.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	62.090.145	PAD		4 Dokumen	22.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	57 Orang/bulan ASN	11.438.439.251	PAD/DAU		60 ASN	17.993.925.985,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	12 Laporan	42.130.000,00	PAD		16 Laporan	65.006.040,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Kota Batam	7 Orang	83.027.000	PAD		8 orang	77.410.960,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	10.499.000,00	PAD		1 Paket	5.953.684.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	3 Paket	107.576.100,00	PAD		3 Paket	71.062.117,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Batam	2 Paket	18.920.000,00	PAD		12 Laporan	9.543270,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	168.673.000,00	PAD	-	12 Laporan	268.673.000,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Batam	56 Unit	298.279.400,00	PAD		56 Unit	488.155.140,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kota Batam	10 Unit	355.736.232,00	PAD		31 Unit	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	12 Laporan	139.656.000,00	PAD		12 Laporan	229.148.198,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahJasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Batam			PAD		1 Paket	191.104.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Batam	1 Unit	40.380.000,00	PAD		1 Unit	121.169.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa	Kota Batam		208.320.000,00	PAD		12 Unit	386.825.234,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam	56 Unit	65.610.000,00	PAD		56 Unit	75.971.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	195.000.580,00	PAD		2 Unit	233.051.808,00
Peningkatan Pelayanan BLUD								

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Batam	1 Unit Kerja	700.000.000,00	PAD	-		902.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif		41.11 %	52.493.300,00	PAD		41,87%	431.090.507
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		50 Unit Usaha	22.750.800,00	PAD		100 Unit Usaha	286.589.722,00
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah	Jumlah Koperasi yang telahdilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		357 Unit Usaha	29.742.500,00	PAD		50 Unit Usaha	144.500.785,-
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		43.65 %	18.979.000,00	PAD		44,72%	189.792.531,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam	1024 Orang	18.979.000,00	PAD	-		189.792.531,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	Batam	59,09%	215.691.200,00	PAD		70,44%	822.091.749,00
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam								

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Batam			PAD		60 Kelompok Masyarakat	401.635.938,00
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Batam	50 Unit Usaha	33.187.000,00	PAD		160 Unit Usaha	221.245.678,00
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi	Batam	50 Unit Usaha	13.075.200,00	PAD		50 Unit Usaha	199.210.133,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro informal dan formal yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	Batam	76,39%	4.910.697.400,00	PAD		82,05%	3.655.002.588,00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.								
Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Batam	50 Kegiatan	400.000.000,00	PAD			
Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	Batam	1200 Unit Usaha	1.909.296.000,00	PAD			
Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Batam	650 Orang	2.368.112.000,00	PAD			

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	Batam	68,91%	5.128.651.700	PAD			
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								
Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Riset dan Inovasi Produk	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitas pengembangan riset dan inovasi produk		150 Unit Usaha	300.000.000,00				
Pembinaan dan Fasilitas Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Batam	500 Unit Usaha	2.620.178.600,00				
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	Batam	100 Unit Usaha	223.023.400,00				
Pembinaan dan Fasilitas Perluasan Produk UMKM Pasar Luar Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perluasan Produk Pasar Luar Negeri	Batam	700 Produk	924.454.600 ,00				
Pembinaan dan Fasilitas Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negeri	Batam	700 Produk	924.454.600,00				
Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Batam	25 Unit Usaha	257.449.000,00				

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)	Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	Batam	1 Unit Kerja	803.546.100,00				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				803.546.100,00				
J U M L A H				22.540.585.198,00				35.553.385.098,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	- Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha		-	803.546.100,00		-	-	886.346.000,00
Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM	Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	Batam	1 Unit Kerja	803.546.100,00			1 Unit Kerja	886.346.000,00
J U M L A H				24.348.865.798,00				33.017.349.822,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 memasuki tahun ke-3 Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk Tahun 2027 dilaksanakan melalui 8 (delapan) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 45 (empat puluh lima) sub kegiatan beserta usulan pendanaan (pagu indikatif) tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						24,348,865,798		35.774.915.330,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24,348,865,798		35.774.915.330,00
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						24,348,865,798		35.774.915.330,00
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.022.353.198,00		26.549.357.863,00
		<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan</i>						14.022.353.198,00		26.549.357.863,00
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD	100 Nilai		97 Nilai	85,8 Nilai		99 Nilai	
			Nilai SAKIP PD	80.55 Nilai		73.55 Nilai	74.55 Nilai		76.55 Nilai	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						161.521.635,00		176.497.235,00
		Tersusunnya Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		6 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	
	2.17.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						99.431.490,00		104.407.090,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		6 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen	
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						62.090.145,00		72.090.145,00
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.480.569.251,00		22.625.526.664,00
		Terlaksananya layanan administrasi keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		100%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.438.439.251,00		22.579.396.664,00
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	57 Orang/bulan		50 Orang/bulan	
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						42.130.000,00		46.130.000,00
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						83.027.000,00		93.027.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		7 Orang	7 Orang		7 Orang	
	2.17.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						83.027.000,00		93.027.000,00
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		7 Orang	7 Orang		7 Orang	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						294.253.100,00		564.508.500,00
		Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket		2 Paket	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket		1 Paket	
			Jumlah Paket Peralatan dan	3 Paket		3 Paket	3 Paket		3 Paket	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
	2.17.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.499.000,00		30.176.500,00
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket		1 Paket	
	2.17.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						107.576.100,00		235.276.000,00
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket		3 Paket	
	2.17.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						18.920.000,00		30.383.000,00
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket		2 Paket	
	2.17.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						157.258.000,00		268.673.000,00
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						654.015.632,00		1.195.704.432,00
		Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		100 %		100 %	100 %			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit		10 Unit	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	0 unit		2 Unit	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		15 Unit	56 Unit		25 Unit	
	2.17.01.2.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00		584.095.000,00
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	0 unit	0,00	2 Unit	
	2.17.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel						355.736.232,00		294.432.232,00
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit		10 Unit	
	2.17.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						298.279.400,00		317.177.200,00
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		15 Unit	56 Unit		25 Unit	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						139.656.000,00		279.609.232,00
		Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		100%		100%	100%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			dan Listrik yang Disediakan							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan		12 Laporan	
	2.17.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						139.656.000,00		279.609.232,00
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	139.656.000,00	12 Laporan	
	2.17.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00		0,00
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	12 Laporan	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						509.310.580,00		712.484.800,00
		Terlaksananya pemeliharaan BMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		100%		100%	100%	509.310.580,00		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit		2 Unit	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	4 Unit		4 Unit	13 Unit		4 Unit	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			dan Perizinannya							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit		1 Unit	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit		56 Unit	56 Unit		56 Unit	
	2.17.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.380.000,00		50.380.000,00
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit		1 Unit	
	2.17.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						208.320.000,00		293.890.000,00
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	13 Unit		4 Unit	
	2.17.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						65.610.000,00		75.610.000,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit		56 Unit	56 Unit		56 Unit	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						195.000.580,00		292.604.800,00
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit		2 Unit	
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						700.000.000,00		902.000.000,00
		Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	
	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						700.000.000,00		902.000.000,00
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						52.493.300,00		109.411.500,00
		Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Presentase Koperasi Aktif	41,92 %			41,11 %		41,87 %	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						52.493.300,00		109.411.500,00
		Sudah di Awasinya dan di periksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha		0 Unit Usaha	50 Unit Usaha		100 Unit Usaha	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	320 Unit Usaha		307 Unit Usaha	357 Unit Usaha		407 Unit Usaha	
	2.17.03.2.01.00 03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						22.750.800,00		50.250.145,00
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha		0 Unit Usaha	50 Unit Usaha		100 Unit Usaha	
	2.17.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						29.742.500,00		59.161.355,00
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	320 Unit Usaha		307 Unit Usaha	357 Unit Usaha		407 Unit Usaha	
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						18.979.000,00		600.000.000,00
		<i>Meningkatnya SDM koperasi yang erfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan</i>	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	48.88 Persentase		39.80 Persentase	43.65 Persentase		44,27 Persentase	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						18.979.000,00		600.000.000,00
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan				69,47 persentase		79,65 persentase	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Perkoperasian							
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1150 Orang		874 Orang	1024 Orang		850 Orang	
	2.17.05.2.01.00 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						18.979.000,00		600.000.000,00
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1150 Orang		874 Orang	1024 Orang		850 Orang	
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						215.691.200,00		199.104.200,00
		<i>Meningkatnya Koperasi yang meaksanakan RAT</i>	<i>Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT</i>	<i>81,25</i>			<i>59,09 persentase</i>		<i>70,44 Persent</i>	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						215.691.200,00		199.104.200,00
		-	Persentase unit usaha dan kelompok masyarakat yang menddapat pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				60,00 persen		73,33 pesent	
			Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/ kota				64 Unit Usaha		-	
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	300 Unit Usaha		100 Unit Usaha	50 Unit Usaha		200 Unit Usaha	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	199 Unit Usaha		158 Unit Usaha	50 Unit Usaha		258 Unit Usaha	
	2.17.06.2.01.00 03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						13.075.200,00		88.732.000,00
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	317 Kelompok Masyarakat		197 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat		257 Kelompok Masyarakat	
	2.17.06.2.01.00 04	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						33.187.000,00		86.219.600,00
		Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	300 Unit Usaha		100 Unit Usaha	50 Unit Usaha		200 Unit Usaha	
	2.17.06.2.01.00 09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						169.429.000,00		24.152.600,00
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/KotaKeanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	199 Unit Usaha		158 Unit Usaha	64 Unit Usaha		258 Unit Usaha	
	2.17.06.2.01.00 08	Fasilitasi pelaporan koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								-
			Jumlah koperasi yang difasilitasi pelaporan						-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						4.910.697.400,00		3.655.002.588,00
		<i>Meningkatnya Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi Izin dan Pelatiha</i>	<i>Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Usah</i>	82,05			76,35 persen		79,46 persen	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						4.910.697.400,00		3.655.002.588,00
		Terlaksanannya Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan				68,39 persen		78,40 persen	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-		-	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-		-	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	-		-	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-		-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	-		-	-		-	
			Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	-		-	-		-	
			Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	-		-	-		-	
			Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	-		-	-		-	
			Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	-		-	-		-	
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						0,00		
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-		-	
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						2.368.112.000,00		2.368.112.000,00
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	650 Orang		650 Orang	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.17.07.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha						233.289.400,00		233.289.400,00
		Terfasilitasinya perlindungan UMKM melalui Pemulihan Usaha dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	160 Unit Usaha	233.289.400,00	160 Unit Usaha	233.289.400,00
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitas Perizinan Berusaha bagi UMKM						1.909.296.000,00		1.909.296.000,00
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	1200 Unit Usaha	1.909.296.000,00	1200 Unit Usaha	1.909.296.000,00
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						400.000.000,00		400.000.000,00
		Terlaksananya Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	50 Kegiatan	400.000.000,00	50 Kegiatan	400.000.000,00
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk						0,00		0,00
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	0 Unit Usaha	0,00	0	
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						4.325.105.600,28		6,084,209,806,00
		Meningkatnya Pelaku Usaha yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	91.31 %		58.07 %	68.91 %		77.75 %	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						4.325.105.600,28		5.727.980.967,00
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					57,87 %		71,91 %	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	-		-	-		-	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	-		-	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	-		-	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negeri	-		-	-		-	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perluasan Produk Pasar Luar Negeri	-		-	-		-	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	25 Orang		-	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset	-		-	150 Unit Usaha			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			dan inovasi produk							
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	100 Unit Usaha			
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha				25 Orang		-	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk				150 Unit Usaha		-	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh pengembangan melalui inkubasi usaha				25 orang		-	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik				100 unit usaha		-	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM				500 unit usaha		-	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari				700 produk		-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.17.08.2.01.00 12	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha						257.449.000,00		328.959.900,00
		Terlaksananya Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	25 Orang	257.449.000,00	25 Orang	257.449.000,00
	2.17.08.2.01.00 17	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Riset dan Inovasi Produk						300.000.000,00		300.000.000,00
		Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk bagi UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	-		-	150 Unit Usaha		150 Unit Usaha	
	2.17.08.2.01.00 21	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM						223.023.400,00		223.023.400,00
		Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	100 Unit Usaha		100 Unit Usaha	
	2.17.08.2.01.00 22	Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM						2.620.178.600,28		2.620.178.600,28
		Terfasilitasinya Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	500 Unit Usaha	2.620.178.600,28	500 Unit Usaha	2.620.178.600,28
	2.17.08.2.01.00 23	Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri						924.454.600,00		924.454.600,00
		Terfasilitasinya pengembangan UMKM dalam Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negeri	-		-	700 Produk		700 Produk	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)						803.546.100,00		886.346.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
		<i>Meningkatnya Pelaku Usaha yang berdaya saing dalam pengembangan usaha</i>								
			Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	91.31 %		58.07 %	68.91 %		77.75 %	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					-	-		-
			Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-		-	-	
	2.17.08.2.01.00 08	Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM						803.546.100,00		886.346.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Terlaksananya Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM	Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	1 Lembaga		1 Lembaga	
	J U M L A H	24.348.865.798,00		33.017.349 .822,00						

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2027 diwujudkan melalui indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja tersebut disusun sebagai dasar pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan target kinerja Tahun 2027 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DinaskUM Kota Batam Tahun 2025–2029, selaras dengan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2026. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, sinkronisasi kebijakan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan Dina KUM Tahun 2027 meliputi:

Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama Dinas KUM Tahun 2027 dan Target Akhir Tahun 2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2030
1.	Persentase usaha mikro naik kelas dan koperasi sehat	Persen	48,60	59,25	73,6
2.	Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	Persen	57,19	68,91	91,31
3.	Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam	Persen	40,00	49,59	55,90
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persen	90,81	91,21	91,81

Tabel 5.2 Indikator Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
1.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	30,02%	33,72%
2.	Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	60%	60,19%
3.	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	31,41%	32,54%

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam pelayanan perencanaan pembangunan daerah.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD